

Ringkasan **Proyek**



Pengarusutamaan Gender melalui Kesepakatan Kemitraan ILO-Norwegia (GMP)

Tujuan	Menciptakan pekerjaan layak, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender dalam hal pekerjaan dan jabatan.
Mitra Utama	■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ■ Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ■ Serikat Pekerja
Jangka Waktu	18 bulan (1 Juli 2012 – 31 Desember 2013)
Cakupan Geografis	Nasional
Referensi Program Nasional:	Mengembangkan respons nasional terhadap tantangan yang diidentifikasi lembaga perjanjian internasional dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi di dunia kerja.
Donor	
Anggaran	USD 124,582
Kontak	Lusiani Julia Staf lusiani@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam dunia kerja merupakan tanggung jawab semua konstituen dan staf ILO. Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap-tahap Kemitraan ILO-Norwegia sebelumnya sepanjang tahun 2008-2011, Proyek Pengarusutamaan Gender melalui Kesepakatan Kemitraan ILO-Norwegia (GMP) ini akan difokuskan pada upaya memastikan kegiatan-kegiatan di bawah Kesepakatan Kemitraan tersebut telah diarusutamakan secara gender, yaitu “permasalahan perempuan dan laki-laki merupakan dimensi terpadu dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan ILO di Indonesia sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat menikmati manfaatnya dan ketidaksetaraan tidak terus berlangsung”.

Proyek GMP akan bekerja sama dengan proyek LAB/ADMIN dalam mempromosikan “administrasi tenaga kerja dan inspektorat pengawasan ketenagakerjaan yang seimbang dan perka terhadap gender...sehingga dapat menangani masalah kesetaraan gender.”

Terkait dengan kegiatan bersama DECLARATION, Proyek ini akan mempromosikan “penerapan Konvensi ILO No. 87 dan 98 yang berperan penting dalam mewujudkan hak-hak lain, termasuk hak asasi perempuan” serta “memastikan adanya pengintegrasian dimensi-dimensi gender secara sistematis ke dalam kebijakan pasar kerja dan kebijakan makro ekonomi secara umum, mengatasi masalah-masalah khusus seperti kesenjangan upah antargender, peningkatan perlindungan terhadap diskriminasi, keseimbangan antara pekerjaan-keluarga dan prasarana pengasuhan anak, kekerasan dan pelecehan seksual, serta promosi pekerjaan perempuan.

Tujuan Proyek

Kerangka kerja logis dari Proyek GMP ini dikaitkan langsung dengan proyek-proyek mitra yang didanai pemerintah Norwegia. Tujuan dari Proyek GMP ini



adalah memastikan tujuan dan hasil langsung yang disusun di Indonesia bersifat sensitif gender.

Tujuan keseluruhan: menciptakan pekerjaan layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan serta kesetaraan gender dalam hal pekerjaan dan jabatan.

Tujuan khusus proyek ini adalah:

Tujuan Khusus 1: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengawas ketenagakerjaan tentang kesetaraan gender di tempat kerja agar dapat meningkatkan kinerja serta memperkuat kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Tujuan Khusus 2: Momentum kebijakan yang dihasilkan dan kapasitas yang ditingkatkan di tingkat konfederasi dan organisasi pekerja rumah tangga untuk berorganisasi, membentuk koalisi, berafiliasi dan mempromosikan kampanye internasional ITUC “12 in 12”, Pekerjaan layak untuk Pekerja Rumah Tangga, termasuk Kebebasan Berserikat, dan ratifikasi Konvensi ILO No.189.

Kegiatan Utama di Indonesia

- Penyusunan modul pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan tentang “Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Gender”, termasuk mengadakan pelatihan bagi para pengawas ketenagakerjaan terkait;
- Penyusunan Panduan tentang Kesetaraan Upah bagi perusahaan;
- Lokakarya pelatihan di tingkat provinsi bagi para penggiat pekerja rumah tangga dengan menggunakan buku panduan pelatihan yang baru tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia;
- Advokasi tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 189, dan kerangka hukum nasional tentang hak-hak pekerja rumah tangga; dan
- Pelatihan untuk serikat pekerja, pekerja non-serikat pekerja dan pengusaha agar lebih memahami pelaksanaan kebebasan berserikat dan perundingan bersama, terutama untuk pekerja di sektor perekonomian informal.

Pencapaian Terkini

- Penyusunan Panduan tentang Kesetaraan Upah.

